

Women's Representation in The Leadership Structure of The Prosperous Justice Party (PKS) in Bandung City

Representasi Perempuan dalam Struktur Kepemimpinan Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung

Alifia Rasyida

Program Studi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi,
Universitas Padjadjaran
alifiarasyida8@gmail.com

Abstract

Women's representation in political party leadership in Indonesia remains a critical issue in the pursuit of a more inclusive democracy. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) in Bandung City serves as a compelling case study as it presents itself as a modern Islamic party that provides space for women's participation, yet continues to uphold role divisions rooted in traditional values. This study aims to examine and analyze how women's representation is manifested in the leadership structure of Partai Keadilan Sejahtera in Bandung City, how the party's organizational culture influences this form of representation, and how communication strategies are employed to construct the image of women's political inclusion. This research adopts a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews with female cadres of Partai Keadilan Sejahtera in Bandung City, document analysis, and participatory observation. The findings reveal that although the involvement of female cadres has increased, their roles remain focused on social and domestic domains through the Women and Family Resilience Division (BPKK). Strategic decision-making positions, meanwhile, continue to be dominated by male cadres. The communication strategy of Partai Keadilan Sejahtera in shaping the image of female representation is carried out through publicizing social activities, conducting training programs for female cadres, and promoting Islamic family values across the party's communication platforms. Theoretically, this study draws on social constructivism and political representation theory to understand the dynamics between symbolic and substantive representation. These findings are expected to contribute to academic discourse on women's representation and politics, and to offer practical insights for PKS and other political parties in designing internal policies, communication strategies, and leadership development programs that strengthen women's roles in a more equitable, substantive, and transformative manner.

Keywords: *Women's Representation, Political Leadership, Organizational Culture, PKS, Political Party.*

Abstrak

Keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan partai politik di Indonesia tetap menjadi isu penting dalam upaya mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung menjadi studi kasus menarik karena menampilkan citra sebagai partai Islam modern yang membuka ruang bagi peran perempuan, namun masih mempertahankan pembagian peran berdasarkan nilai-nilai tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana representasi perempuan dimanifestasikan dalam struktur kepemimpinan Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung, bagaimana budaya organisasi memengaruhi bentuk representasi tersebut, serta bagaimana strategi komunikasi partai dalam membangun citra keterwakilan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap kader-kader Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung, studi dokumentasi, dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keterlibatan kader perempuan mengalami peningkatan, peran mereka masih terfokus pada ranah sosial dan domestik melalui Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK). Sementara itu, posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan masih didominasi oleh kader laki-laki. Strategi komunikasi Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung dalam membangun citra representasi perempuan dilakukan melalui publikasi kegiatan sosial, pelatihan kader perempuan, serta kampanye citra keluarga Islami di berbagai kanal komunikasi partai. Secara teoretis, penelitian ini mengacu pada pendekatan konstruktivisme sosial dan teori representasi politik

dalam memahami relasi antara keterwakilan simbolik dan substantif perempuan dalam partai. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian tentang keterwakilan perempuan dan politik, serta menjadi masukan praktis bagi Partai Keadilan Sejahtera dan partai politik lainnya dalam merancang kebijakan internal, strategi komunikasi, dan program kaderisasi, guna memperkuat keterwakilan perempuan secara lebih setara, substantif, dan transformatif.

Kata Kunci: Representasi Perempuan, Kepemimpinan Politik, Budaya Organisasi, PKS, Partai Politik.

1. Pendahuluan

Keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan partai politik di Indonesia masih menjadi isu penting dalam mewujudkan demokrasi inklusif. Meskipun kebijakan afirmatif kuota 30% telah diatur melalui UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu dan diperkuat dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 245, perempuan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural dalam memperoleh posisi strategis dan kewenangan substantif di internal partai.

Pada Pemilu 1999, perempuan hanya memperoleh 8,8% kursi DPR. Setelah kebijakan kuota gender diterapkan, representasi meningkat menjadi 20,9% pada Pemilu 2019 (Aspinall *et al.*, 2021), tetapi belum mencapai 30% dan belum otomatis meningkatkan pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara representasi deskriptif dan substantif, sehingga perubahan budaya politik internal yang lebih inklusif diperlukan (Dzuhayatin, 2020).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menarik dikaji karena memiliki karakter organisasi religius-konservatif sekaligus menunjukkan keterbukaan terhadap perempuan. Melalui Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK), PKS aktif menyelenggarakan program kaderisasi dan kepemimpinan perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan keluarga (Haq, 2024). Ratih Damayanti (2025), Kepala BPKK DPD PKS Kota Bandung, menjelaskan bahwa program tersebut diarahkan untuk membangun kapasitas perempuan sebagai pemimpin dan penggerak masyarakat dengan berlandaskan nilai keluarga.

Namun, keterwakilan perempuan dalam struktur kepemimpinan DPD PKS Kota Bandung masih fluktuatif. Pada periode 2010–2015, perempuan menduduki 9 dari 20 posisi (45%); periode 2015–2019 turun menjadi 10 dari 82 posisi (12,2%); dan periode 2022–2025 meningkat menjadi 11 dari 44 posisi (25%). Perempuan umumnya ditempatkan pada bidang sosial, kesejahteraan, kaderisasi, dan BPKK, sedangkan posisi strategis seperti Ketua DPD, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, serta bidang politik dan pemenangan pemilu masih didominasi laki-laki. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah perempuan belum sepenuhnya diikuti akses yang setara terhadap pusat pengambilan keputusan.

Temuan tersebut sejalan dengan Adriani & Maulia (2024) yang menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam partai politik Indonesia masih cenderung simbolik, terutama ketika perempuan ditempatkan pada bidang sosial dan pendidikan tanpa pengaruh signifikan dalam keputusan strategis. Antwi *et al.* (2024) juga menegaskan bahwa komitmen partai terhadap keterwakilan perempuan berpengaruh terhadap citra dan strategi komunikasi politik. Dengan demikian, representasi perempuan tidak hanya berkaitan dengan jumlah, tetapi juga posisi, kewenangan, dan bagaimana keterlibatan tersebut dikomunikasikan kepada publik.

PKS Kota Bandung dipilih karena memiliki kader perempuan yang relatif banyak serta program pemberdayaan perempuan yang aktif, tetapi masih menunjukkan

ketimpangan dalam distribusi posisi strategis. Penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif dengan perspektif *Public Relations* untuk menganalisis bagaimana representasi perempuan membentuk citra PKS, bagaimana strategi komunikasi partai dibangun, serta bagaimana media dan publik meresponsnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis representasi perempuan dalam struktur kepemimpinan PKS Kota Bandung, mengidentifikasi tantangan dan strategi perempuan dalam mencapai posisi kepemimpinan, serta mengeksplorasi strategi komunikasi PKS dalam membangun citra sebagai partai yang responsif terhadap keterwakilan perempuan. Penelitian ini berjudul **“Representasi Perempuan dalam Struktur Kepemimpinan Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung (Studi Kasus Kualitatif Keterwakilan Perempuan dalam Kepemimpinan Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung)”**.

2. Metode

Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk memahami secara mendalam keterwakilan perempuan dalam struktur kepemimpinan PKS Kota Bandung. Pendekatan kualitatif berfokus pada makna yang terbentuk dari pengalaman dan interaksi subjek dalam konteks sosial tertentu (Creswell, 2014; Ilhami *et al.*, 2024). Studi kasus digunakan untuk menganalisis fenomena secara kontekstual, khususnya peran, posisi, tantangan, dan peluang perempuan dalam organisasi PKS.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, untuk mengeksplorasi bagaimana keterwakilan perempuan terbentuk, dimaknai, dan dinegosiasikan dalam struktur kepemimpinan PKS Kota Bandung. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, studi pustaka, dokumen daring, dan arsip organisasi. Sumber data meliputi kader perempuan PKS, pengurus struktural, dokumen internal partai, laporan Pemilu 2024, dan literatur ilmiah. Penggunaan berbagai sumber mendukung proses triangulasi data (Ilhami *et al.*, 2024).

Teknik Penentuan Key Informant

Informan dipilih menggunakan *purposive sampling*, berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan posisi strategis terkait keterwakilan perempuan. Kriteria informan meliputi: (1) kader aktif PKS Kota Bandung lebih dari tiga tahun; (2) memiliki atau pernah memiliki posisi dalam struktur kepemimpinan partai; dan (3) terlibat dalam isu representasi perempuan, budaya organisasi, atau komunikasi partai.

Informan penelitian terdiri atas:

1. Pujo Raharjo, Wakil Sekretaris Program dan Isu Strategis DPD PKS Kota Bandung, terkait programatik dan narasi partai.
2. Dikdik Ahmad Sidik, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat DPD PKS Kota Bandung, terkait komunikasi dan citra partai.
3. Ratih Damayanti, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPD PKS Kota Bandung, terkait pemberdayaan dan representasi perempuan.

Pemilihan informan didasarkan pada relevansi posisi dan pengalaman mereka terhadap isu keterwakilan perempuan, komunikasi, dan struktur organisasi partai.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri atas kader perempuan PKS yang menduduki posisi strategis maupun nonstrategis serta pengurus PKS di tingkat pusat maupun daerah yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait representasi perempuan. Subjek dipilih secara purposive berdasarkan pengalaman kepemimpinan, peran dalam partai, dan pemahaman terhadap kebijakan internal.

Objek Penelitian

Objek penelitian adalah keterwakilan perempuan dalam struktur kepemimpinan PKS Kota Bandung. Kajian mencakup representasi formal, deskriptif, dan substantif, serta tantangan struktural dan budaya yang memengaruhi keterwakilan perempuan dan strategi mereka dalam menghadapi hambatan tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka/dokumentasi, kemudian dianalisis secara triangulatif.

1. Observasi

Observasi dilakukan secara tidak langsung melalui situs resmi PKS, media sosial, dokumentasi kegiatan, dan publikasi daring untuk mengidentifikasi citra serta narasi partai mengenai perempuan (Creswell, 2014).

2. Wawancara

Wawancara semi-terstruktur dilakukan kepada informan yang memahami struktur kepemimpinan dan keterlibatan perempuan di PKS. Panduan wawancara disiapkan sebelumnya, tetapi pertanyaan dapat dikembangkan sesuai respons informan (Creswell, 2014).

3. Studi Pustaka dan Dokumentasi

Studi pustaka mencakup buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen partai, dan artikel mengenai representasi perempuan dalam politik. Dokumen dan arsip digunakan untuk memperkuat temuan observasi dan wawancara serta mendukung kerangka teoritik dan interpretasi data (Creswell, 2014).

3. Hasil dan Pembahasan

Representasi Perempuan dalam Struktur Kepemimpinan PKS Kota Bandung

Representasi Performatif: Pemenuhan Kuota dan Fungsi Sosial Perempuan

Secara formal, PKS mengadopsi kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% sesuai regulasi nasional. Namun, keterwakilan tersebut belum selalu diikuti distribusi kekuasaan yang setara. Data penelitian menunjukkan bahwa perempuan telah memenuhi ruang formal organisasi, tetapi posisi strategis dan pengambilan keputusan masih didominasi laki-laki.

Pujo Raharjo (2025) menyatakan bahwa ketentuan 30% dari tingkat pusat telah dipenuhi oleh PKS Kota Bandung. Meskipun demikian, perempuan lebih banyak menjalankan fungsi sosial, edukatif, dan pemberdayaan, seperti kegiatan RKI, pelatihan domestik, dan pendidikan moral. Sementara itu, posisi strategis seperti ketua fraksi dan pengambil kebijakan utama lebih banyak ditempati laki-laki.

Ratih Damayanti (2025) menegaskan bahwa perempuan di PKS memiliki posisi sebagai mitra dan sejak awal telah mendapat ruang keterwakilan 30%. Ia juga menilai peran perempuan di tingkat masyarakat cukup dominan, termasuk dalam dukungan

suara pada pemilihan kepala daerah. Namun, dominasi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam posisi puncak struktur partai.

Dengan demikian, pemenuhan kuota lebih mencerminkan representasi performatif, yaitu kehadiran perempuan secara formal dan administratif, tetapi belum sepenuhnya menunjukkan kesetaraan dalam distribusi kekuasaan.

Representasi Substantif: Ketimpangan dalam Akses Kekuasaan Strategis

Menurut Pitkin (1967) dan Mahpudin (2020), representasi substantif menekankan partisipasi nyata dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaderisasi dan keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan PKS Kota Bandung meningkat, terutama dalam kegiatan sosial, edukasi, dan pengembangan kader. Namun, peningkatan tersebut belum berbanding lurus dengan akses perempuan terhadap posisi elit strategis seperti Ketua DPD, Sekretaris Umum, dan bidang strategis lainnya.

Pujo Raharjo (2025) menyebutkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kegiatan PKS cukup tinggi karena banyak perempuan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat. Meskipun pencalonan legislatif memenuhi kuota 30%, keterpilihan perempuan pada tingkat kota masih sekitar 20%, yaitu 2 dari 11 anggota terpilih.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara partisipasi dan kekuasaan. Perempuan semakin aktif dalam kaderisasi dan kegiatan partai, tetapi akses terhadap posisi strategis dan pengambilan keputusan masih terbatas.

Analisis Representasi Perempuan dalam Struktur PKS Kota Bandung

Representasi perempuan dalam kepemimpinan DPD PKS Kota Bandung cenderung bersifat performatif karena keterlibatan formal belum sepenuhnya berkembang menjadi kekuasaan substantif. Data internal menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan mencapai 45% pada periode 2010–2015, kemudian turun menjadi 12,2% pada 2015–2019, dan meningkat menjadi 25% pada 2022–2025. Meskipun mengalami peningkatan, perempuan masih lebih sedikit pada posisi strategis dan lebih banyak ditempatkan pada bidang sosial, pendidikan moral, serta BPKK.

Fenomena ini sejalan dengan temuan Adibah dan Jatiningsih (2022) mengenai ketimpangan antara pencapaian numerik dan kekuasaan substantif dalam PKS. Dzuhayatin (2020) juga menunjukkan bahwa kuota gender dapat diterapkan secara formalistik tanpa disertai redistribusi kekuasaan internal.

Dalam perspektif performativity Judith Butler, kehadiran perempuan dalam struktur politik dapat menjadi bentuk praktik sosial yang terus direproduksi tanpa otomatis menghasilkan perubahan distribusi kekuasaan. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan di PKS Kota Bandung telah memperoleh ruang formal dan berpartisipasi aktif dalam organisasi, tetapi belum memiliki akses yang setara terhadap otoritas dan pengambilan keputusan strategis.

Budaya Organisasi PKS dan Pembentukan Peran Perempuan Nilai Dakwah, Moralitas, dan Keluarga sebagai Pondasi Budaya Organisasi

PKS memiliki sistem kaderisasi yang berjenjang dan terstruktur yang menekankan pembinaan ideologi, loyalitas, dan nilai dakwah Islam. Dalam praktiknya, kader perempuan lebih banyak diasosiasikan dengan kegiatan sosial, keagamaan, keluarga, dan pelayanan masyarakat, sedangkan laki-laki lebih dominan pada posisi strategis dan pengambilan keputusan.

Pujo Raharjo (2025) menjelaskan bahwa perempuan di PKS memiliki loyalitas tinggi karena keterlibatan mereka didorong oleh keyakinan dan nilai dakwah, bukan semata-mata ambisi politik. Pola ini diperkuat oleh *Tadzkirah Dewan Syariah Pusat PKS* No. 60/T/DSP-PKS/1439 tentang Komitmen (*Iltizam*) kepada Jamaah yang menekankan pentingnya ketaatan terhadap kepemimpinan sebagai bagian dari kehidupan berjamaah (*Tadzkirah DSP PKS*, 2018).

Dalam konteks perempuan, nilai *iltizam* membentuk keterikatan moral yang kuat terhadap peran dalam struktur partai, termasuk ketika peran tersebut tidak berada pada pusat pengambilan keputusan. Hal ini terlihat dalam program BPKK/RKI, seperti sekolah ibu, pembinaan Al-Qur'an di rumah tahanan, dan aksi peduli lingkungan. Program tersebut menunjukkan aktualisasi nilai dakwah, moralitas, keluarga, dan solidaritas sosial melalui aktivitas kader perempuan.

Segmentasi Peran Perempuan dalam Struktur Kepemimpinan Partai

Terdapat segmentasi peran dalam struktur DPD PKS Kota Bandung. Kader laki-laki mendominasi posisi strategis seperti Ketua DPD, Ketua Dapil, Sekretaris, dan Bendahara dengan proporsi sekitar 70%, sedangkan perempuan sekitar 30%. Sebaliknya, pada bidang sosial dan edukasi berbasis keluarga, perempuan mendominasi sekitar 80%, sementara laki-laki sekitar 20%.

Dikdik Ahmad Sidik (2025) menjelaskan bahwa perempuan ditempatkan pada bidang keluarga, pendidikan, dan sosial berdasarkan kebutuhan umat, kesiapan, dan minat kader. Meskipun tidak terdapat larangan formal bagi perempuan untuk menduduki posisi lain, praktik tersebut menunjukkan adanya pembagian peran berbasis gender.

Temuan ini sejalan dengan Dzuhayatin (2020) bahwa partai berbasis agama cenderung mengaitkan perempuan dengan fungsi moral dan domestik, serta Tabassum & Nayak (2021) yang menunjukkan bahwa segmentasi peran dapat diperkuat oleh nilai organisasi dan tafsir keagamaan yang menempatkan perempuan sebagai aktor pendukung. Observasi pada *SPKK Awards* juga menunjukkan bahwa penghargaan kader perempuan lebih banyak diberikan atas kontribusi dalam keluarga, pendidikan, sosial, dan dakwah dibandingkan posisi strategis.

Budaya Hierarkis dan Loyalitas Kultural terhadap Peran Perempuan

Budaya organisasi PKS menekankan loyalitas, kepatuhan, dan kedisiplinan kader. Bagi perempuan, nilai tersebut banyak diwujudkan melalui peran dalam ketahanan keluarga, sosial, pendidikan, dan pemberdayaan. Ratih Damayanti (2025) menegaskan bahwa *core* peran perempuan dalam PKS adalah ketahanan keluarga yang difasilitasi melalui BPKK.

Meskipun kuota 30% secara administratif telah terpenuhi di Kota Bandung (Pujo Raharjo, 2025), struktur hierarkis dan budaya loyalitas tetap memengaruhi posisi perempuan sebagai pendukung kegiatan sosial dan dakwah. Hal ini sejalan dengan Aspinall *et al.* (2021) bahwa struktur politik berbasis budaya dapat mereproduksi peran tradisional perempuan. Dalam perspektif konstruktivis, kondisi tersebut

menunjukkan bahwa representasi perempuan dibentuk tidak hanya oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh nilai dan norma organisasi.

Observasi pada SPKK Awards memperlihatkan reproduksi budaya tersebut melalui simbol dan aktivitas publik, seperti *dresscode* syal Palestina, slogan “*Produktif, Inspiratif, Menyala*”, serta pemberian penghargaan yang menekankan disiplin, kebersamaan, loyalitas, dan etos pelayanan. Dengan demikian, budaya organisasi PKS membentuk peran perempuan melalui perpaduan nilai dakwah, keluarga, loyalitas, dan pelayanan sosial.

Strategi Komunikasi dan *Public Relations* PKS dalam Membangun Citra Keterwakilan Perempuan

Strategi komunikasi PKS Kota Bandung tidak hanya digunakan untuk menyampaikan program dan gagasan politik, tetapi juga membentuk citra partai, termasuk terkait keterwakilan perempuan. Representasi perempuan ditampilkan melalui media sosial, dokumentasi kegiatan, kampanye berbasis keluarga dan sosial-keumatan, serta pelibatan perempuan sebagai kader, narasumber, dan relawan.

Menurut Dowling (2001), citra organisasi terbentuk melalui interaksi antara pesan organisasi dan interpretasi publik. Karena itu, penampilan kader perempuan di ruang publik menjadi bagian dari strategi *Public Relations* untuk membangun citra PKS sebagai partai yang terbuka, religius, dan responsif terhadap perempuan. Namun, citra tersebut perlu dilihat secara kritis untuk mengetahui apakah mencerminkan kekuasaan substantif atau hanya representasi performatif.

Representasi Perempuan dalam Media dan Aktivitas Sosial Partai

Observasi terhadap Instagram @pksbandung menunjukkan bahwa perempuan direpresentasikan secara aktif, terutama melalui peran sosial, edukatif, dan keagamaan, seperti kegiatan Hari Kartini, milad kader perempuan, pembagian daging kurban, pengajian, dan pelatihan UMKM (Akun Instagram @pksbandung, 2025). Narasi visual juga menampilkan perempuan sebagai figur keibuan, religius, edukatif, dan teladan melalui konten kesehatan, *mental health*, *parenting* Islami, dan dakwah komunitas.

Akun @rki_kotabandung turut menjadi media penting dalam menampilkan perempuan sebagai agen edukasi moral, penjaga nilai keluarga, dan penggerak komunitas berbasis dakwah (Akun Instagram @rki_kotabandung, 2025). Penggunaan seragam, warna feminin, serta visual kebersamaan dan kekompakan memperkuat citra perempuan sebagai kader yang religius, kolektif, disiplin, dan berorientasi pelayanan.

Namun, representasi tersebut lebih banyak menonjolkan peran sosial, edukasi, moralitas, dan keluarga, sedangkan posisi perempuan sebagai pengambil keputusan politik strategis relatif tidak ditonjolkan. Dikdik Ahmad Sidik (2025) menjelaskan bahwa kegiatan BPKK dan RKI memiliki segmentasi tersendiri karena yang ditampilkan bukan hanya program, tetapi juga keteladanan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi PKS cenderung membangun citra perempuan sebagai figur moral, edukatif, dan sosial dibandingkan sebagai aktor politik strategis.

Analisis Strategi Komunikasi dan Citra Perempuan

Hasil reduksi data wawancara menunjukkan tiga pola utama. Pertama, representasi deskriptif, yaitu pemenuhan kuota 30% dan keterlibatan formal perempuan dalam struktur partai (Pujo Raharjo, 2025; Ratih Damayanti, 2025; Dikdik Ahmad Sidik, 2025). Kedua, representasi substantif, yang menunjukkan bahwa perempuan aktif dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan, tetapi belum merata pada posisi strategis. Ketiga, konstruksi sosial peran perempuan, yang menempatkan perempuan dekat dengan ketahanan keluarga, dakwah, dan kegiatan sosial.

Pujo Raharjo (2025) menekankan loyalitas perempuan yang kuat karena didorong keyakinan dan nilai dakwah. Ratih Damayanti (2025) menempatkan ketahanan keluarga sebagai *core* peran perempuan dalam PKS, sedangkan Dikdik Ahmad Sidik (2025) menjelaskan bahwa penempatan perempuan pada bidang keluarga, pendidikan, dan sosial disesuaikan dengan kebutuhan umat, kesiapan, dan minat kader.

Dengan demikian, strategi komunikasi *Public Relations* PKS Kota Bandung berhasil menampilkan perempuan sebagai bagian penting dari identitas sosial dan keumatan partai. Namun, terdapat kesenjangan antara citra keterwakilan perempuan yang dibangun di ruang publik dan akses perempuan terhadap posisi strategis di internal partai. Representasi yang dikomunikasikan lebih kuat pada aspek sosial, keluarga, moralitas, dan pelayanan dibandingkan otoritas politik dan pengambilan keputusan strategis.

Pembahasan

Distribusi Peran Perempuan dalam Ranah Sosial dan Kepemimpinan Strategis

Perempuan seringkali diandalkan untuk menjalankan berbagai kegiatan sosial dan administratif yang bersifat lapangan, seperti pelaksanaan program kesejahteraan (contoh RKI), pelatihan keterampilan domestik, dan pengajaran nilai moral masyarakat. Kegiatan ini berfokus pada pemberdayaan sosial dan pembangunan komunitas, yang memang sangat penting untuk menjaga hubungan partai dengan basis massa. Representasi perempuan pada kegiatan tersebut bersifat performatif artinya perempuan terlihat aktif dan dominan di permukaan (tampilan luar) struktur organisasi, tetapi lebih ke arah simbolis daripada memiliki kekuatan sebenarnya. Hal ini bisa jadi membentuk citra bahwa perempuan "terlibat", tapi sebenarnya hanya pada level tertentu yang tidak strategis. Walau peran perempuan penting di lapangan, mereka sering kali terpinggirkan dari akses ruang pengambilan keputusan esensial dalam partai. Posisi strategis dan pimpinan puncak masih didominasi oleh laki-laki atau struktur patriarkal, sehingga membuat perempuan sulit untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan atau strategi politik besar.

Solusi untuk mengatasi masalah keterbatasan perempuan dalam mengakses posisi puncak partai adalah dengan mendorong partai politik membuka ruang kepemimpinan yang lebih inklusif dan strategis bagi perempuan, melalui langkah-langkah seperti kebijakan afirmatif, pelatihan kepemimpinan, dan perubahan budaya organisasi. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas perempuan agar tidak hanya dominan di kegiatan sosial, tapi juga mampu berperan aktif di pengambilan keputusan politik. Langkah-langkah ini dapat membantu mengatasi dominasi simbolis perempuan di tingkat lapangan dan membuka jalan bagi keterlibatan perempuan yang lebih substantif dan strategis di puncak partai.

Menurut Hannah Pitkin, representasi substantif adalah bentuk representasi di mana para wakil benar-benar memperjuangkan dan mengartikulasikan kepentingan

kelompok yang mereka wakili, bukan hanya secara formal terlihat mewakili. Dalam konteks perempuan di partai politik, ini artinya perempuan tidak hanya hadir secara kuantitatif di struktur organisasi, melainkan benar-benar memiliki suara dan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan penting. Narasi ini menuntut pendekatan yang lebih kritis dalam melihat representasi perempuan, agar fokus tidak hanya pada peningkatan jumlah keterlibatan, tetapi pada pengukuran keberhasilan perempuan dalam posisi strategis yang berdampak kebijakan

Partai PKS, yang dikenal memiliki struktur dan kultur yang cukup konservatif, memperlihatkan contoh klasik di mana perempuan aktif di tingkat basis dan kegiatan sosial, tetapi kesulitan naik ke posisi elit. Meskipun keterlibatan perempuan dalam kegiatan partai cukup signifikan, hal tersebut belum diikuti dengan keberadaan perempuan di posisi elit strategis seperti Ketua DPD atau Sekretaris Umum. Posisi-posisi penting yang menentukan pengambilan keputusan utama masih didominasi oleh laki-laki, sehingga perempuan menghadapi hambatan struktural yang signifikan untuk mencapai level pimpinan tertinggi dalam partai

Performatifitas Representasi Perempuan dalam Struktur Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung

Representasi performatif berarti keterlibatan perempuan dalam struktur organisasi muncul lebih sebagai bentuk pemenuhan kuota atau simbolis semata, bukan sebagai partisipasi yang bermakna dalam proses pengambilan keputusan strategis (Tamim et al., 2024). Mekanisme ini bisa terjadi karena adanya batasan budaya atau sosial yang membatasi peran perempuan dalam posisi strategis dan kurangnya dukungan dan pengembangan kapasitas perempuan untuk menempati posisi pengambilan keputusan (Cantika & Rafiqah, 2024). Representasi perempuan dalam struktur kepemimpinan DPD PKS Kota Bandung cenderung bersifat performatif, yaitu kehadiran perempuan dalam struktur organisasi memang secara kuantitatif memenuhi kuota minimum 30% pencalonan sebagaimana diatur undang-undang, namun keterlibatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi substantif dalam proses pengambilan keputusan strategis. Hal ini selaras dengan pernyataan Pujo Raharjo bahwa:

"Secara caleb tetep memenuhi 30% kok. Walaupun yang jadi sekitar 20%, 2 dari 11 orang." (Pujo Raharjo, 2025)

Kutipan ini mengindikasikan bahwa meskipun regulasi kuota formal diikuti, secara realitas representasi perempuan belum sepenuhnya terwujud dalam posisi strategis.

Lebih lanjut, struktur partai cenderung menempatkan perempuan di ranah sosial atau domestik seperti kegiatan edukasi keluarga dan kaderisasi, sebagaimana tercermin dari pendapat Ibu Ratih Damayanti:

"Perempuan itu mitra, bukan subkoordinat... Tapi memang segmentasinya beda. Di BPKK atau DSW, porsi kepemimpinan perempuan justru besar." (Ratih Damayanti, 2025)

Kutipan ini mengindikasikan bahwa meskipun regulasi kuota formal diikuti, secara realitas representasi perempuan belum sepenuhnya terwujud dalam posisi strategis.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa perempuan dikonstruksikan secara sosial sebagai aktor di wilayah "perempuan" yang dianggap cocok, seperti pembinaan

keluarga, pendidikan moral, atau sosial keagamaan, dan bukan dalam ranah pengambilan keputusan strategis seperti Ketua DPD atau Sekretaris Umum.

Apabila dikaji dari perspektif konstruktivisme sosial, realitas ini tidak bersifat natural melainkan dibentuk oleh norma sosial, budaya organisasi, dan interpretasi kolektif dalam institusi partai. Sebagaimana dijelaskan oleh Berger & Luckmann (1966), posisi sosial dan identitas gender dibentuk melalui proses institusionalisasi dan internalisasi nilai yang berlangsung terus-menerus dalam interaksi sosial. Dalam konteks PKS, proses institusionalisasi ini membentuk konstruksi bahwa perempuan idealnya berada di ranah sosial dan pendukung, bukan pengarah atau pengambil kebijakan utama.

Dengan demikian, keterwakilan perempuan dalam DPD PKS Kota Bandung lebih tepat disebut sebagai performatif-simbolik secara struktural, namun terbatas secara substantif. Representasi ini bukan hanya hasil dari regulasi formal, tetapi juga refleksi dari konstruksi sosial internal partai yang belum sepenuhnya membuka ruang strategis bagi perempuan.

Budaya Organisasi PKS dan Pembentukan Peran Perempuan

PKS memiliki model kaderisasi yang terorganisir, mulai dari level dasar hingga tingkat atas, memastikan setiap kader memahami nilai dan visi dakwah secara konsisten. Loyalitas terhadap nilai dakwah menjadi pondasi yang mengikat semua kader dalam proses tersebut. Meski kaderisasi ini telah berjalan dengan baik secara struktural, peran perempuan cenderung dibatasi pada bidang pelayanan dan dakwah yang lebih operasional dan sosial. Pembatasan ini membuat akses perempuan ke posisi pengambil keputusan strategis yang berpengaruh menjadi sangat terbatas. Kurangnya keterwakilan perempuan di posisi pimpinan strategis berarti suara dan perspektif perempuan belum sepenuhnya terakomodasi dalam pengambilan keputusan besar. Mekanisme ini berpotensi menghambat diversitas pemikiran dan kebijakan yang lebih inklusif. Untuk menciptakan budaya kaderisasi yang lebih inklusif dan berkeadilan gender, PKS bisa mulai membuka ruang bagi kader perempuan untuk mengembangkan orientasi strategis kekuasaan melalui program pelatihan kepemimpinan, mentoring, serta kebijakan afirmasi yang mendorong perempuan untuk berperan aktif di level pengambilan keputusan strategis.

Terdapat segmentasi peran kader perempuan dalam struktur organisasi DPD PKS Kota Bandung. Hal ini tampak dalam pembagian bidang tugas di mana kader laki-laki mendominasi struktur strategis, seperti Ketua DPD, Ketua Dapil, Sekretaris, dan Bendahara, sementara kader perempuan lebih banyak ditempatkan pada bidang sosial dan edukasi berbasis keluarga, seperti Badan Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) atau program Rumah Keluarga Indonesia (RKI). Segmentasi peran berdasarkan gender dalam struktur organisasi DPD PKS Kota Bandung dapat berdampak pada pembatasan peluang perempuan untuk menduduki posisi strategis, yang pada akhirnya dapat mengurangi keberagaman perspektif dalam pengambilan keputusan strategis dan berpotensi menghambat kemajuan organisasi secara menyeluruh. Namun, penempatan perempuan di bidang sosial dan edukasi juga memberikan kontribusi penting dalam penguatan aspek sosial dan keluarga, yang merupakan basis signifikan dalam masyarakat.

Dalam konteks DPD PKS Kota Bandung, budaya hierarkis dan loyalitas kultural terhadap peran perempuan berperan sebagai faktor struktural yang memperkuat segmentasi peran gender. Budaya hierarkis dalam organisasi memprioritaskan posisi-

posisi strategis dipegang oleh kader laki-laki, sementara loyalitas kultural terhadap peran tradisional perempuan menempatkan kader perempuan lebih banyak pada bidang sosial dan edukasi yang berorientasi keluarga. Budaya ini memperkuat stereotip dan norma gender yang membatasi mobilitas perempuan ke posisi kepemimpinan strategis

Budaya hierarkis dan loyalitas kultural terhadap peran perempuan dalam organisasi seperti DPD PKS Kota Bandung dapat berdampak pada terbatasnya ruang gerak perempuan untuk naik ke posisi strategis serta memperkuat stereotip gender yang menghambat kesetaraan peran. Budaya ini menyebabkan dominasi laki-laki dalam posisi pimpinan yang dianggap lebih berotoritas, sementara perempuan tertahan pada posisi yang berorientasi sosial dan keluarga, sehingga organisasi berpotensi kehilangan keberagaman perspektif, inovasi, dan dinamika dalam pengambilan keputusan

Budaya hierarkis dan loyalitas kultural terhadap peran perempuan secara signifikan membatasi peran perempuan dalam struktur organisasi, memperkuat pola dominasi laki-laki di posisi strategis, dan berpotensi menghambat kemajuan organisasi secara menyeluruh (Siti Maesaroh, 2024).

Strategi Komunikasi dan *Public Relations* PKS dalam Membangun Citra Keterwakilan Perempuan

Tokoh perempuan yang tampil sebagai pembawa pesan akan menjadi wajah yang mudah dikenali masyarakat dan kader partai, sehingga membantu publik mengidentifikasi nilai dan visi partai terkait perempuan (Mayrudin et al., 2022). Menampilkan tokoh perempuan sebagai pembawa pesan program merupakan strategi penting dalam komunikasi dan *public relations* PKS untuk membangun citra keterwakilan perempuan. Penggunaan tokoh perempuan sebagai pembawa pesan dapat mempersonalisasi dan menguatkan narasi tentang peran perempuan dalam politik dan masyarakat, sekaligus membuat pesan lebih kredibel dan inspiratif (Hasibuan & Harahap, 2024).

Tindakan nyata perempuan dalam berbagai kegiatan memperkuat citra bahwa PKS serius memberdayakan perempuan secara substansial, bukan hanya sekadar retorika. Menampilkan perempuan yang aktif dan berprestasi di berbagai bidang dalam partai dapat menginspirasi kader perempuan lain dan masyarakat luas untuk terlibat lebih aktif (Adriani & Maulia, 2024). Menampilkan peran aktif perempuan dalam berbagai kegiatan partai merupakan strategi komunikasi penting yang membantu memperkuat citra keterwakilan perempuan (Nursyifa et al., 2023). Dengan memperlihatkan kontribusi nyata perempuan dalam berbagai aktivitas partai, PKS menegaskan bahwa perempuan bukan hanya figur simbolis, namun benar-benar terlibat dan berperan strategis dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program partai.

Menonjolkan keterlibatan perempuan dalam berbagai acara dan posisi kepemimpinan adalah strategi komunikasi dan *public relations* yang esensial bagi PKS dalam membangun citra keterwakilan perempuan. Dengan secara aktif menampilkan perempuan tidak hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai pemimpin dan pengambil keputusan di berbagai acara partai, PKS dapat memperkuat pesan bahwa perempuan memegang peran penting dalam struktur dan aktivitas partai, sekaligus memberikan inspirasi sekaligus legitimasi kepada publik dan kader PKS Kota Bandung menggunakan platform media sosial untuk menampilkan aktivitas perempuan dalam

partai, mulai dari peran kepemimpinan, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, hingga kegiatan sosial yang melibatkan perempuan. Konten yang disebar tidak hanya informatif, tetapi juga emosional dan mengangkat cerita nilai-nilai keluarga dan sosial keagamaan yang relevan bagi target audiens di daerah. Dokumentasi visual berupa foto, video, dan cerita singkat yang menonjolkan keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan partai seperti pengajian, seminar keluarga, kegiatan sosial, dan kampanye keumatan, menjadi bukti konkrit komitmen PKS dalam memberdayakan perempuan dan menjaga nilai-nilai sosial-keumatan. Strategi ini tidak berdiri sendiri, melainkan sinergis dengan aktivitas lain seperti peningkatan kapasitas kader perempuan, penggunaan tokoh perempuan sebagai pembawa pesan, dan keterlibatan perempuan dalam posisi kepemimpinan serta berbagai acara penting partai.

4. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. PKS Kota Bandung telah menyediakan ruang partisipasi perempuan melalui BPKK, kaderisasi, pelatihan, dan program sosial. Perempuan aktif dalam kegiatan komunitas, edukasi keluarga, dan koordinasi program, tetapi keterwakilan pada jabatan inti dan forum pengambilan keputusan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.
2. Nilai dakwah, keluarga, disiplin, dan kaderisasi berjenjang memperkuat peran perempuan dalam layanan sosial dan pembinaan keluarga. Namun, pola tersebut membuat mobilitas perempuan menuju posisi strategis berlangsung bertahap dan membutuhkan dukungan kelembagaan berkelanjutan.
3. Strategi komunikasi PKS menonjolkan karya sosial, keteladanan keluarga, dan aktivitas kader perempuan sehingga membangun citra partai yang ramah keluarga dan inklusif. Strategi ini dapat diperkuat dengan menampilkan kepemimpinan serta capaian kebijakan perempuan agar selaras dengan perkembangan representasi internal.

Saran

1. Meningkatkan keterlibatan perempuan pada jabatan inti dan forum pengambilan keputusan melalui rotasi lintas bidang, penugasan proyek strategis, serta *mentoring/sponsorship*, dengan indikator kinerja yang mengukur partisipasi dalam *agenda-setting* dan pengelolaan sumber daya.
2. Memperkuat kaderisasi melalui pelatihan kepemimpinan strategis, meliputi perencanaan, anggaran, dan negosiasi kebijakan, serta menyediakan jalur karier yang terstruktur bagi kader perempuan tanpa mengurangi peran sosial yang telah berjalan.
3. Mempertahankan narasi keluarga dan pengabdian sosial, sekaligus meningkatkan publikasi mengenai komposisi jabatan, praktik baik, dan program atau kebijakan yang dipimpin perempuan agar perkembangan representasi perempuan dapat terlihat secara transparan dan berbasis data.

5. Daftar Pustaka

- Adibah, N., & Jatiningsih, O. (2022). PENGUATAN BARGAINING POWER KADER PEREMPUAN DI DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) JAWA TIMUR DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAU KEBIJAKAN PARTAI. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 10(3), 743–757.
- Adriani, S., & Maulia, S. T. (2024). Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 131–136. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.287>
- Antwi, B. O., Frimpong, A., & Ansah, A. (2024). The mediated role of corporate image in the relationship between public relations and customer affective engagement. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2378539>
- Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021). Journal of Current Southeast Asian Affairs Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How? In *Journal of Current Southeast Asian Affairs* (Vol. 40, Issue 1).
- Cantika, S. D., & Rafiqah, W. (2024). Gender dan Kekuatan Sosial : Analisis Antropologi Terhadap Peran Wanita Dalam Masyarakat Tradisional Minangkabau. *Journal of Demography, Ethnography, and Social Transformation*, 4(2), 95–100.
- Creswell, J. W. (2014). Creswell-ResearchDesign. In *SAGE Publications, Inc.* Sage Publications, Inc.
- Dzuhayatin, S. R. (2020). Gender glass ceiling in Indonesia: Manifestation, roots and theological breakthrough. *Al-Jami'ah*, 58(1), 209–240. <https://doi.org/10.14421/AJIS.2020.581.209-240>
- Haq, V. A. (2024). Peran Kader Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Optimalisasi Partisipasi Politik Perempuan Melalui Program Pemberdayaan di Kota Depok Pasca Pemilu 2019. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 5(1), 28–45. <https://doi.org/10.33822/jpds.v5i1.7725>
- Hasibuan, A. T. A., & Harahap, E. W. (2024). Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender di Partai Politik (Studi di Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan). *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(4), 1150–1158.
- Ilhami, M. W., Vera Nurfajriani, W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, W. (2024). Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(9), 462–469. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129>
- Mahpudin. (2020). *Partisipasi Politik Masyarakat Adat Baduy dan Implikasinya terhadap Representasi Politik: Kepentingan Adat yang Tersisih Political Participation of Baduy Indigenous Peoples and Their Implications for Political Representation: Marginalized Indigenous Interests*. 113–128.
- Mayrudin, Y. M., Nurrohmah, B., & Astuti, D. S. (2022). Eksistensi Politik Kader Perempuan pada Pengorganisasian Partai-partai Politik. *Ijd-Demos*, 4(3). <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i3.323>
- Nursyifa, A., Tamala, O. T., Zakiah, R., Rachamani, S. A., & Mutmainah, S. M. (2023). Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 9(1), 25–35. <https://doi.org/10.37058/jipp.v9i1.4120>
- Siti Maesaroh. (2024). Pengembangan Perempuan dalam Pengembangan Karakter Santri (Kepemimpinan Ibu Nyai Umi Waheeda di Pondok Pesantren Al Ashriyyah Nurul Iman Parung , Bogor). *Tesis*.
- Tabassum, N., & Nayak, B. S. (2021). Gender Stereotypes and Their Impact on Women's Career Progressions from a Managerial Perspective. *IIM Kozhikode Society and*

Management Review, 10(2), 192–208.
<https://doi.org/10.1177/2277975220975513>

Tamim, R., Isti'ana, A., & Suslina, S. (2024). Komunikasi Perempuan dalam Dakwah (Menciptakan Ruang untuk Representasi dan Kepemimpinan). *Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies*, 4(1), 44.
<https://doi.org/10.24042/jwcs.v4i1.22496>